**PENGARUH JUMLAH ANGGOTA, VOLUME USAHA, LIKUIDITAS
DAN JUMLAH KEWAJIBAN KOPERASI TERHADAP
PERMINTAAN JASA AUDIT PADA KOPERASI
DI KOTA BUKITTINGGI**

Oleh:

Yonanda Oriza

Pembimbing: Amries Rusli Tanjung dan Eka Hariyani

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: yonanda.oriza@gmail.com

The Effect of number of members, business volume, liquidity and total liabilities of cooperatives to demand audit services on a cooperative in Bukittinggi

ABSTRACT

The current need for reliable financial statements, and can be trusted is necessary in making a decision. The problem in this study is whether which the effect of number of members, the business volume, liquidity and total liabilities the demand for audit service. The population in this study were 80 cooperatives and the research sample is 49 cooperatives in Bukittinggi. the dependent variables in this study are demand audit services. While the independent variables are the number of members, the business volume, liquidity and total liabilities of cooperatives. The data used in form of cooperative financial reports in fiscal year 2014 with using descriptive analysis, multicolonearitas and logistic regression with SPSS version 20. The conclusion of this research is variable number of members, liquidity and total liabilities affect on demand for audit services, while business of members does not affect the audit service.

Keyword: business volume, liquidity, total liabilities, and audit

PENDAHULUAN

Kelembagaan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang pengelolaannya dilaksanakan oleh sekelompok orang yang ditunjuk dengan kata lain pengelolaannya dilakukan oleh pengurus yang dibantu oleh manajemen, oleh sebab itu akan timbul pemisahan antara pemilik (anggota) dan pengelola (pengurus). Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asa kekeluargaan.

Pengelolaan koperasi dilakukan oleh pengurus koperasi yang dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat anggota, oleh sebab itu akan timbul pemisahan fungsi antara pemilik (anggota) dan pengelola (pengurus). Tanggung jawab pengurus terhadap anggota

diwujudkan dalam penyampaian laporan keuangan dalam rapat anggota tahunan (RAT) (UU No.25/1992, pasal 26 ayat 1). Laporan keuangan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan ekonomis sehingga laporan keuangan harus mencerminkan secara wajar kejadian-kejadian financial badan usaha koperasi. Seperti diketahui bahwa untuk pengambilan keputusan dibutuhkan suatu informasi yang dapat dipercaya (*reliable*) sehingga tidak menyesatkan pemakai.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Kewajiban audit berlaku bagi koperasi papan atas yang volume usahanya paling sedikit Rp.1.000.000.000 sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.351/KEP/M/XII/1998. Dilihat dari manfaat audit bagi suatu badan usaha, diharapkan semua badan usaha koperasi diaudit oleh akuntan publik, namun pada kenyataannya tidak semua koperasi diaudit oleh akuntan publik. Kecenderungan suatu koperasi untuk memilih diaudit atau memilih tidak diaudit oleh auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah anggota koperasi, volume usaha, likuiditas dan jumlah kewajiban koperasi.

Faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit adalah jumlah anggota, sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dan dengan prinsip satu anggota satu suara.

Sehingga banyaknya suara atau pendapat menyebabkan wawasan dan kepentingan masing-masing berbeda.

Maka semakin banyak jumlah anggota maka semakin banyak pula perbedaan kepentingan didalam koperasi sehingga suara atau keinginan anggota untuk meminta dilakukannya audit atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh pengurus guna kepentingan anggota bersama dan kemajuan koperasi tersebut.

Menurut Alam.S (2006:240), Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi perusahaan, ukuran perusahaan dapat dinilai dari volume usaha. Semakin besar volume usaha suatu koperasi semakin besar pula transaksi keuangan yang terjadi dan akan sering terjadi kesalahan pada pencatatan transaksi, data akuntansi dan laporan keuangan sehingga hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya permintaan jasa audit terhadap laporan keuangan koperasi.

Likuiditas merupakan suatu rasio indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia (Syamsuddin, 2011:41). Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas. Menurut Sumarsono (2004:94) Likuiditas adalah kemampuan untuk

menyediakan dana dalam jumlah yang cukup untuk membiayai semua transaksi usaha koperasi. Semakin tinggi dana likuid/lancar yang dimiliki koperasi maka koperasi tersebut memiliki kemampuan untuk membiayai pembelanjaan usahanya termasuk didalamnya untuk membayar jasa audit.

Jumlah kewajiban pada pemerintah atau pihak ketiga biasanya mempengaruhi suatu koperasi melakukan permintaan jasa eksternal audit karena pemerintah dan investor menghendaki dana yang dipinjamkan pada koperasi dikelola dengan benar dan aman. Bahkan beberapa perbankan sebelum mengeluarkan pinjaman biasanya menghendaki laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan publik guna menghindari risiko tidak kembalinya pinjaman tersebut.

Ardiansah (2009) yang meneliti tentang pengaruh karakteristik koperasi terhadap permintaan jasa audit: studi empiris koperasi di Kota Semarang. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jumlah anggota, besaran (*size*), *gearing*, dan rasio likuiditas secara individual dan simultan berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal oleh badan usaha koperasi di Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan Utaminingsih & Hidayah (2011) tentang pengaruh jumlah anggota, volume usaha, dan likuiditas terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel jumlah anggota dan likuiditas mempengaruhi permintaan jasa audit secara parsial sedangkan volume bisnis tidak mempengaruhi permintaan jasa audit. Secara

simultan 3 variabel mempengaruhi permintaan jasa audit.

Lisa (2011) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan audit pada KPRI di Kabupaten Lumajang. Hasilnya menunjukkan bahwa variable jumlah anggota, jumlah kewajiban, persepsi manajemen berpengaruh terhadap permintaan audit KPRI di Kab. Lumajang sedangkan variabel skala koperasi dan biaya audit tidak berpengaruh pada permintaan audit KPRI di Kab. Lumajang.

Alfurkaniati (2004) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit akuntan publik pada koperasi perkotaan Pekanbaru-Riau, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel besaran koperasi dan ratio *gearing* signifikan mempengaruhi jasa audit akuntan publik secara parsial. Hasil tidak signifikan ditunjukkan oleh variabel jumlah anggota dan rasio likuiditas.

Banyak sekali manfaat audit yang dapat dirasakan oleh badan usaha yaitu meningkatkan kredibilitas, meningkatkan kejujuran, meningkatkan efisiensi operasi, dan mendorong efisiensi pasar modal, dan juga pengawasan (Rahayu dan Suhayati, 2010). Jika dilihat manfaat audit bagi suatu badan usaha, diharapkan semua badan usaha koperasi agar diaudit oleh akuntan publik, namun dalam kenyataannya tidak semua koperasi diaudit oleh akuntan publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, apakah jumlah anggota berpengaruh terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Bukittinggi, apakah volume usaha berpengaruh terhadap

permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Bukittinggi, apakah likuiditas koperasi berpengaruh terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Bukittinggi, dan apakah jumlah kewajiban koperasi berpengaruh terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah anggota, volume usaha, likuiditas dan jumlah kewajiban terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Bukittinggi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Dinas Koperasi dan UKM sebagai langkah pembinaan koperasi dan sebagai masukan bagi akuntan publik sejauh mana tingkat permintaan audit pada koperasi dan Bagi akademik Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan Permintaan jasa audit pada koperasi serta bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan mengenai pengaruh jumlah anggota, volume usaha dan likuiditas terhadap permintaan jasa audit pada koperasi.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut UU No.25 Tahun 1992 menyatakan bahwa, tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat

pada umumnya. Dalam koperasi laba bukanlah merupakan ukuran utama kesejahteraan anggotanya, namun pemanfaatan yang diterima anggota lebih diutamakan, meskipun demikian koperasi juga harus mengusahakan supaya tidak mengalami kerugian. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tanpa paksaan maupun tekanan apapun dan hubungan antara koperasi dengan para anggota adalah bersifat langsung. Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Di dalam koperasi keterbukaan manajemen koperasi dititikberatkan pada dilaksananya fungsi pertanggung-jawaban dengan baik oleh pengurus koperasi. Istilah manajer ini mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1970-an (Sumarsono, 2004:54). Penempatan manajer dalam suatu koperasi dimaksudkan untuk membantu pengurus. Pengurus bertanggungjawab penuh dan harus paham benar dengan keinginan anggota koperasi serta merumuskannya dalam kebijaksanaan (*policy*).

Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) merupakan sebuah teori yang menunjukkan adanya hubungan keagenan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Hubungan tersebut dijelaskan dalam suatu teori yang dikenal dengan nama *agency theory*, dimana dijelaskan bahwa *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lainnya. Menurut teori keagenan, konflik agensi terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan para

manajernya. Di satu sisi, pemilik menginginkan manajer bekerja keras untuk memaksimalkan utilitas pemilik, namun, di sisi lain, manajer juga cenderung berusaha keras memaksimalkan utilitasnya sendiri

Kebutuhan Akan Jasa Audit

Menurut Sukrisno (2004), Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Auditor bertanggungjawab penuh secara legal atas pekerjaannya yang meyakinkan bahwa informasi tersebut andal. Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:7) Kebutuhan jasa audit di Indonesia dimotivasi oleh karena :

- 1.Syarat yang diberikan kreditur dalam pemberian kredit
- 2.Ketentuan tender, penawaran, pendaftaran rekanan
- 3.Keadaan karena adanya kecurangan
- 4..Ketentuan organisasi yang diatur dalam anggaran dasar.

Permintaan Jasa Audit Bagi Koperasi

Bagi koperasi, penggunaan jasa audit independen juga dibutuhkan. Berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi melakukan audit eksternal dilaksanakan oleh kantor akuntan publik atau koperasi jasa audit dengan tujuan untuk mengaudit

laporan keuangannya sebagai hasil dari pertanggungjawaban pengurus atau manajer. Koperasi membutuhkan jasa auditor independen guna memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajer, agar laporan tersebut relevan dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan para pengguna laporan keuangan koperasi serta pihak-pihak yang terkait.

Permintaan jasa audit yang dilakukan oleh koperasi adalah untuk memperoleh kepastian keakuratan laporan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan pasal 40 Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi koperasi dapat meminta jasa audit akuntan publik, dengan paparan penjelasan bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan yang terbuka dan melindungi pihak yang berkepentingan, koperasi dapat meminta jasa audit akuntan publik baik berupa laporan keuangan maupun lainnya sesuai dengan kebutuhan koperasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha kecil dan Menengah No.351/KEP/M/XII/1998 menyatakan bahwa koperasi yang memiliki volume usaha paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau koperasi jasa audit dan diumumkan kepada anggotanya.

Berdasarkan alasan diatas maka jelas bahwa koperasi membutuhkan jasa audit akuntan publik /jasa eksternal audit.

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Audit Pada Koperasi

Jumlah Anggota

Salah satu keberhasilan koperasi adalah keberhasilannya di bidang anggota, agar sukses koperasi membutuhkan anggota dalam jumlah yang optimal dan berkualitas (Hendar, 2010:148).

Pada suatu badan usaha koperasi yang memiliki jumlah anggota yang cukup besar tentunya semakin banyak pula kepentingan didalamnya. Prinsip yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dan dengan prinsip bahwa 1 anggota = 1 suara, maka apabila semakin banyak jumlah anggota koperasi maka akan semakin banyak pula perbedaan kepentingan didalamnya sehingga suara atau keinginan anggota untuk meminta dilakukannya audit atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajer guna kepentingan anggota bersama dan kemajuan koperasi tersebut.

H1: jumlah anggota berpengaruh terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di Bukittinggi

Volume Usaha

Menurut Alam.S (2006:240), Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. berkesinambungan. Usaha koperasi yang dikelola secara baik dan benar akan menghasilkan laju pertumbuhan usaha yang baik pula. Semakin berkembang besar usaha suatu koperasi tentunya akan meningkatkan volume usahanya juga

akan meningkat, sehingga transaksi usahanya.pun akan ikut meningkat pula, dengan adanya peningkatan tersebut maka akan sering terjadi kesalahan pada pencatatan transaksi, data akuntansi dan laporan keuangan. Kesalahan tersebut tentunya dapat merugikan bagi pihak-pihak yang terkait, Oleh karena itu guna meminimalisir kerugian tersebut maka dibutuhkan pihak eksternal untuk memeriksa laporan keuangan.

Sesuai dengan keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menyatakan bahwa koperasi yang memiliki volume usaha paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau Koperasi Jasa Audit dan diumumkan pada anggotanya.

H2: volume usaha berpengaruh terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di kota Bukittinggi

Likuiditas Koperasi

Menurut Sumarsono (2004:94), Likuiditas adalah kemampuan untuk menyediakan dana dalam jumlah yang cukup untuk membiayai semua transaksi usaha koperasi. Suatu koperasi yang mampu membiayai seluruh kegiatan pembelanjaan usahanya berarti posisi koperasi berada pada posisi stabil atau dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut memiliki dana lancar yang memadai sehingga dapat dikatakan *likuid* karena memiliki kemampuan membayar. Koperasi yang tidak memiliki kemampuan dalam pembiayaan operasionalnya atau

tidak memiliki dana yang memadai maka disebut *likuid*.

Semakin tinggi dana likuid/lancar yang dimiliki koperasi maka koperasi tersebut berada pada posisi marginal. Pembeli marginal yaitu pembeli yang memiliki kemampuan daya beli sama dengan harga pasar, atau bahkan dapat menempati pada posisi pembeli supermarginal yaitu pembeli yang memiliki kemampuan daya beli diatas harga pasar (Ritonga, 2004:129). Koperasi yang berada pada posisi pembeli marginal atau pembeli supermarginal tentunya mampu membayar semua kegiatan pembelanjaan usahanya termasuk juga didalamnya pembayaran jasa audit eksternal.

H3: likuiditas berpengaruh terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di kota Bukittinggi

Jumlah Kewajiban

Hutang atau kewajiban merupakan salah satu komponen yang penting dari suatu neraca, karena itu perlu diketahui definisi yang jelas untuk mengidentifikasi hutang. Menurut definisi yang dikemukakan Bambang Riyanto (2001), mengenai hutang sebagai berikut :“Hutang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan yang pada saatnya harus dibayar kembali”.

Jadi timbulnya hutang ditujukan untuk memperoleh sejumlah dana yang dipakai sebagai modal usaha suatu koperasi untuk menjalankan koperasi itu. Dengan dana yang terkumpul tersebut maka dapat dipergunakan untuk memperoleh aktiva lancar maupun tidak lancar. Jumlah kewajiban pada

pemerintah atau pihak ketiga biasanya mempengaruhi suatu koperasi melakukan permintaan jasa eksternal audit karena pemerintah dan investor menghendaki dana yang dipinjamkan pada koperasi dikelola dengan benar dan aman.

H4 : jumlah kewajiban berpengaruh terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di kota Bukittinggi

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi yang terdaftar di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang telah memiliki laporan keuangan tahun Buku 2014 dan telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga populasi dalam penelitian ini sebanyak 80. Metode pengumpulan sampel (*Sample Method*) yang digunakan adalah *Purposive Samplin* dengan kriteria telah melaksanakan RAT dan telah menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2014 ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 49 koperasi sebagai sampel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan koperasi yang menjadi sampel tahun buku 2014. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi laporan keuangan koperasi yang sudah masuk ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Metode analisis data digunakan analisis regresi logistik dengan rumus sebagai berikut:

$$\ln P/(1-P) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan :

Ln = log of natural

P= badan usaha koperasi yang diaudit
 1-P= badan usaha koperasi yang tidak diaudit
 X1 = jumlah anggota
 X2 = volume usaha
 X3 = likuiditas
 X4 = jumlah kewajiban
 β = Koefisien parameter logistik regresi.

Definisi Operasional Variabel

Jumlah Anggota

Jumlah Anggota didasarkan kepada jumlah anggota pada masing-masing koperasi yang telah tercantum didalam laporan keuangan koperasi tahun buku 2014 yang diperoleh dari Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi

Volume Usaha

Volume usaha dalam penelitian adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan atau jasa pada tahun buku yang bersangkutan, sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No.351/KEP/M/KUKM/XII/1998 menyatakan bahwa koperasi yang memiliki volume usaha paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau koperasi jasa audit. Dalam penelitian ini volume usaha koperasi diukur dengan menggunakan *log of natural* dari volume usaha koperasi. Penggunaan *log of natural* ini disebabkan dispersi atau sebaran data pada variabel ini tidak rata, cenderung ekstrim.

Likuiditas Koperasi

Salah satu cara untuk mengukur kondisi keuangan koperasi adalah dengan menggunakan rasio

likuiditas. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan uang) ada sekian kali dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Standar yang baik untuk rasio ini adalah 200 persen (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.22/PER/M.KUKM/IV/2007).

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Total Aktiva Lancar}}{\text{Total Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Jumlah Kewajiban

Jumlah kewajiban adalah kewajiban atau hutang lembaga yang harus dibayar oleh koperasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban koperasi dapat berasal dari: anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah (Firdaus dan Susanto, 2002).

Jumlah kewajiban dalam variabel ini adalah kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang yang ditanggung oleh koperasi pada periode tertentu yang besarnya terdapat dalam neraca pada posisi pasiva yang dinyatakan dalam satuan rupiah pada periode tahun 2014. Dan diukur dengan menggunakan *log of natural* dari jumlah kewajiban

Permintaan Jasa Audit

Permintaan jasa audit akuntan publik yang dimaksud disini adalah permintaan koperasi terhadap jasa audit laporan keuangan oleh pihak akuntan publik. Koperasi yang telah diaudit oleh auditor eksternal, dengan menggunakan variabel dummy diberi skor 1 untuk koperasi yang telah diaudit sedangkan

koperasi koperasi yang tidak diaudit diberi skor 0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan statistik koperasi yang diaudit mempunyai jumlah anggota terkecil 223 sedangkan koperasi yang tidak diaudit memiliki jumlah anggota terkecil 42. Sedangkan jumlah anggota pada koperasi yang diaudit paling banyak memiliki anggota sebanyak 1513 dan pada koperasi yang tidak diaudit jumlah anggota terbesarnya sebanyak 793. Rata-rata (*mean*) jumlah anggota koperasi yang diaudit adalah 597.17 sedangkan untuk koperasi yang tidak diaudit sebesar 186.65. Sedangkan untuk volume usaha menjelaskan bahwa koperasi yang audit volume usaha terkecil Ln20.452 sedangkan koperasi yang tidak diaudit oleh akuntan publik memiliki volume usaha terkecil Ln18.187. Pada koperasi yang diaudit oleh akuntan publik, volume usaha terbesarnya Ln25.290 dan untuk koperasi yang tidak diaudit oleh akuntan publik volume usaha terbesarnya Ln24.290. Rata-rata(*mean*) volume usaha untuk koperasi yang diaudit adalah Ln23.09825 dan rata-rata (*mean*) volume usaha untuk koperasi yang tidak diaudit adalah Ln21.41405.

Deskriptif untuk ratio likuiditas menunjukkan bahwa ratio terendah koperasi yang diaudit 0.81 dan koperasi yang tidak diaudit 0.220. Ratio tertinggi untuk koperai diaudit 4.040 dan tidak audit 3.720. Rata-rata (*mean*) koperasi yang diaudit 2.23917 dan tidak audit 2.45054.

Dan untuk Statistik deskriptif jumlah kewajiban terkecil Ln18.920 yang diaudit dan Ln15.23 untuk koperasi yang tidak diaudit. Jumlah kewajiban tertinggi pada koperasi yang diaudit Ln23.145 dan Ln22.30 untuk yang tidak diaudit. Rata-rata (*mean*) koperasi yang diaudit Ln21.22577 dan tidak audit Ln19.0833.

Regresi Logistik

Uji Multikolonieritas

TABEL 1
Correlation Matrix

	Constant	ANGGOT A	VOLUME	LIKUIDIT AS	KEWAJIB AN
Constant	1.000	-.631	.456	-.718	-.761
ANGGOT A	-.631	1.000	-.732	.828	.771
VOLUME	.456	-.732	1.000	-.860	-.921
LIKUIDIT AS	-.718	.828	-.860	1.000	.911
KEWAJIB AN	-.761	.771	-.921	.911	1.000

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 20, 2015

Tabel diatas menyajikan korelasi antara variabel independen. Korelasi antar variabel independen tidak terlalu besar, bahkan nilai korelasi tertinggi hanya sebesar 0.456 (variabel<0,9). Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak ada hubungan yang kuat atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa model ini tidak mengandung unsur multikolonieritas dan data layak diuji.

Hasil Pengujian Kelayakan Model (*Goodness of fit*)

TABEL 2
Hosmer and Lemeshow Test

Chi-square	df	Sig.
.719	8	.999

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 20, 2015

Nilai *chi square* adalah 0,719 dengan signifikansi sebesar 0,999. Dengan tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat α sebesar 0,05 maka H_0 tidak dapat ditolak (H_0 diterima) dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2013).

Keseluruhan Model (*overall Model Fit*)

Menilai keseluruhan model (*overall model fit*) dengan melihat angka -2 Log Likelihood (LL) pada awal (*Block number=0*) dan angka -2 Log Likelihood pada *block number=1*. Dari pengolahan data dihasilkan nilai -2 log likelihood (LL) pada awal (*block number=0*) sebesar 54,553 dan pada *Block number=1* sebesar 18,183. Dengan demikian penurunan angka -2 Log Likelihood sebesar 36,415 yang menunjukkan model regresi fit.

TABEL 3
Classification Table

	Observed	Predicted		
		Y		Percentage
		TIDAK AUDIT	AUDIT	Correct
Step	TIDAK AUDIT	36	1	97.3
AUDIT	AUDIT	2	10	83.3
Overall Percentage				93.9

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 20, 2015

Berdasarkan tabel maka dapat diketahui bahwa ketetapan peramalan pada model ini cukup baik yaitu sebesar 93,9%. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel bebas yang dimasukkan kedalam model ini yaitu jumlah anggota, volume usaha, likuiditas dan jumlah kewajiban dapat dipergunakan untuk

memprediksi permintaan jasa audit dengan estimasi 93,9%.

Pengujian Hipotesis

TABEL 4
Variables in Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
ANGGOTA	.015	.007	4.695	1	.030	1.015
VOLUME	-2.498	1.509	2.741	1	.098	.082
Step 1 ^a LIKUIDITAS	4.306	2.091	4.239	1	.040	74.138
KEWAJIBAN	4.615	1.944	5.633	1	.018	100.975
Constant	-54.421	20.015	7.393	1	.007	.000

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 20, 2015

Pengaruh Jumlah Anggota Terhadap Permintaan Jasa Audit.

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana nilai jumlah anggota memiliki nilai signifikansi 0,030 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibangun yaitu bahwa jumlah anggota berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.

Pengelolaan koperasi biasanya tidak semata-mata dapat dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu pada umumnya koperasi menunjuk orang diluar anggota sebagai pengelola koperasi. Sehingga pada posisi yang seperti ini timbulah hubungan antara pengelola kita sebut *agent* dengan pemilik yang disebut *principal*. Adanya perbedaan kepentingan dan semakin banyaknya jumlah anggota koperasi tersebut akan menimbulkan perbedaan pendapat serta kepentingan antar

anggotayang berbeda pula maka hal ini mendorong untuk dilakukannya audit laporan keuangan dengan menggunakan jasa auditor *independen*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Januar dan Nasir (2006) dan Utaminingsih & Hidayah (2011) pada koperasi di Kota Semarang yang menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Alfurkaniati (2004) menunjukkan bahwa jumlah anggota tidak signifikan mempengaruhi permintaan jasa audit

Pengaruh Volume Usaha Terhadap Permintaan Jasa Audit

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel volume usaha tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana variabel volume usaha memiliki nilai signifikansi 0,098 yang lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Ketidaksesuaian logika teori dan hipotesis yang dibangun dengan hasil penelitian dimungkinkan disebabkan oleh penggunaan sampel pada penelitian ini yang menggunakan *random sampling* sehingga memunculkan sampel yang belum dapat mewakili secara keseluruhan (hanya koperasi dengan volume usaha menengah sampai kecil sedangkan koperasi dengan volume usaha besar belum terwakili)

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Utaminingsih & Hidayah (2011) pada koperasi di Kota Semarang bahwa volume usaha

tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Begitu pula yang diungkapkan oleh Januar & Nasir (2006) pada KPRI di Jawa Tengah bahwa skala koperasi yang diukur melalui volume usaha tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfurkaniati (2004) bahwa besaran koperasi yang diukur melalui volume usaha berpengaruh terhadap permintaan jasa audit dan hasil penelitian Ardiansah (2009) pada koperasi di kota Semarang menunjukkan bahwa besaran yang diukur melalui volume usaha berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Permintaan Jasa Audit.

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana variabel likuiditas memiliki nilai signifikansi 0,040 yang lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hasil penelitian ini sama dengan hipotesis yang dibangun di awal yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.

Hasil penelitian ini menunjukkan semakin rendah tingkat rasio likuiditas koperasi maka semakin tinggi permintaan terhadap jasa audit. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan koperasi didalam menyediakan dana dalam jumlah yang cukup untuk membiayai transaksi usahanya (Sumarsono: 2004). Berdasarkan pengertian

tersebut dapat dijabarkan bahwa apabila suatu koperasi memiliki likuiditas yang tinggi maka koperasi tersebut memiliki jumlah dana yang cukup banyak untuk dapat digunakan didalam pembiayaan usahanya termasuk didalamnya untuk membayar jasa audit.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Utaminingsih & Hidayah (2011) dan Ardiansah (2009) bahwa likuiditas berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Alfurkaniati (2004) pada koperasi perkotaan Pekanbaru-Riau menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.

Pengaruh Jumlah Kewajiban Terhadap Permintaan Jasa Audit

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel jumlah kewajiban berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana variabel jumlah kewajiban memiliki nilai signifikansi 0,018 dimana nilainya lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hal ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun yaitu jumlah kewajiban berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.

Hutang jangka pendek (Munawir : 2004) adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (1tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban yang dimiliki koperasi harus dilunasi dengan

jangka waktu. Dan hasil ini sesuai dengan kenyataan bahwa untuk dapat meminjam uang ke bank diharuskan untuk menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit. Dengan demikian semakin banyak kewajiban yang dimiliki oleh koperasi tersebut dituntut untuk melakukan audit atas laporan keuangannya.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Lisa(2011) pada KPRI di Kab.Lumajang bahwa jumlah kewajiban berpengaruh terhadap permintaan jasa audit. Namun hasil penelitian yang dilakukan Ratna Wijayanti DP dan Ery Hidayanti (2014) menyimpulkan bahwa jumlah kewajiban tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan audit eksternal.

SIMPULAN,KETERBATASAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1.Jumlah anggota koperasi berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.
- 2.Volume usaha koperasi tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.
- 3.Likuiditas koperasi berpengaruh terhadap permintaan jasa audit
- 4.Jumlah kewajiban koperasi berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.

Keterbatasan

Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak keterbatasan, keterbatasan tersebut tentu saja akan mempengaruhi hasil dari penelitian. Adapun keterbatasan tersebut yaitu objek penelitian terbatas hanya pada laporan keuangan koperasi di Kota

Bukittinggi dan proporsi koperasi yang diaudit dengan tidak diaudit yang tidak sama. Pada penelitian yang jumlah sampel yang lebih besar dan proporsi yang hampir sama antara koperasi yang diaudit dengan tidak diaudit mungkin akan membantu mengatasi keterbatasan tersebut.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah: 1) Koperasi yang memiliki jumlah anggota yang bertambah maka sebaiknya juga memikirkan akan kebutuhan jasa audit terhadap laporan keuangan koperasi dan bagi koperasi yang memiliki dana likuid yang tinggi hendaknya menggunakan jasa audit demi meningkatkan kredibilitas dan lebih meningkatkan kinerja koperasi. 2) Dalam penelitian yang akan datang hendaknya mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap permintaan jasa audit oleh koperasi. Jika dilihat dari ketetapan peramalan model, ketetapan peramalan model ini hanya 93%. Dengan penambahan variabel lain diharapkan ketetapan peramalan model akan semakin meningkat. Dan bagi hasil peneliti selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel, karena penelitian ini hanya mencakup koperasi yang aktif Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2014 yang berada di Kota Bukittinggi, dengan menambah jumlah sampel penelitian maka hasil penelitian selanjutnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukirno, 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)*

Oleh Kantor Akuntan Publik. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Alam,S. 2006. *Ekonomi*. Jilid Ketiga. Jakarta: Esis.

Alfurkaniati. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Audit Akuntan Publlik pada Koperasi Perkotaan di Pekanbaru-Riau*. Tesis Tidak Diterbitkan. Semarang : Universitas Dipenogoro.

Ardiansah, N.M. 2009. *Pengaruh Karakteristik Koperasi Terhadap Permintaan Jasa Audit : Studi Empiris Koperasi Di Kota Semarang*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.1, No.1, 6-13.

Arens, Alvin A., et al. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance : Pendekatan Integrasi* (Alih Bahasa: Herman Wibowo), Jilid 1, Edisi Keduabelas, Jakarta: Erlangga.

Bambang Riyanto, 2001 *dasar-dasar pembelanjaan perusahaan*. Edisi keempat, cetakkan ketujuh, Yogyakarta : BPFE

Firdaus. M dan Susanto.A.E, 2002 “*Perkoperasian : Sejarah, Teori dan Praktek*.”Penerbit Ghalia Indonesia , Jakarta.

Gozhali, Imam.2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.

Semarang: Universitas
Diponegoro

Jurnal ilmiah akuntansi dan
humanika vol.3 no.2

- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta:2010.
- Januarti,I. dan M.Nasir. 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Audit pada KPRI di Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi, Vol.4, 175-186.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 129/KEP/M.KUKM/XI/2002, tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi.
- Lisa, Oyong, 2011.*Analisis factor-faktor permintaan Audit Pada KPRI KAB.LUMAJANG*, jurnal WIGA, Vol.2, No.2.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Peningkatan Koperasi
- Rahayu,Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Auditing : Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratna Wijayanti DP dan Ery Hidayanti, 2014. *Pengaruh anggota,skala koperasi, jumlah kewajiban terhadap permintaan audit eksternal*.
- Ritonga, M.T. 2004, *Pelajaran Ekonomi Jilid I*. Jakarta : Erlangga.
- S. Munawir. 2004.*Analisis Laporan Keuangan*,Edisi ke-4, Liberty, Yogyakarta.
- Sumarsono, S. 2004. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga.
- Syamsuddin, Lukman. 2011 *Manajemen Keuangan* . Edisi kelima. Jakarta: Literata Lintas Media
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Utamingsih, N. S. dan Retroningrum Hidayah, 2011 *Pengaruh Jumlah Anggota, Volume Usaha dan Likuiditas Koperasi Terhadap Permintaan Jasa Audit*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.3, h.51-59